



Akses Informasi Publik Sebagai Kunci Pemberdayaan Perempuan Di Komunitas Lokal

Rinawati¹

¹) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti.
Email: rinakery@gmail.com

*Corresponding Author: rinakery@gmail.com

Abstract: Access to public information plays a strategic role in empowering women, particularly in local communities that often face structural barriers in education, economy, and healthcare. This study aims to understand how access to information can empower women to enhance their participation in decision-making at the community level. Using a qualitative descriptive approach, the research was conducted in Koto Tengah District, Padang City. The results show that public information positively contributes to the improvement of women's literacy on climate change adaptation, urban farming, and disaster preparedness. Identified barriers include limited digital literacy and the lack of gender-responsive policies. The study recommends strengthening gender-friendly information infrastructure and promoting more active involvement of women in local policy planning.

Keywords: public information access; women's empowerment; local communities; climate change adaptation; digital literacy.

Abstrak: Akses informasi publik memainkan peran strategis dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di komunitas lokal yang sering menghadapi kendala struktural dalam hal pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akses informasi dapat memberdayakan perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi publik berkontribusi positif terhadap peningkatan literasi perempuan tentang adaptasi perubahan iklim, urban farming, dan kesiapsiagaan bencana. Hambatan yang teridentifikasi meliputi keterbatasan literasi digital dan kurangnya kebijakan yang responsif gender. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur informasi yang ramah gender dan pelibatan lebih aktif perempuan dalam perencanaan kebijakan lokal.

Kata Kunci: akses informasi publik; pemberdayaan perempuan; komunitas lokal; adaptasi perubahan iklim; literasi digital.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima yang menekankan pentingnya kesetaraan gender (United Nations,

2015). Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, perempuan sering kali menghadapi hambatan sosial, ekonomi, dan politik yang membatasi peran aktif mereka dalam masyarakat (Susanti, 2021). Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya akses terhadap informasi publik yang relevan untuk mendukung pengembangan kapasitas mereka.

Informasi publik didefinisikan sebagai segala bentuk informasi yang dikuasai oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses terhadap informasi publik memungkinkan perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi maupun komunitas mereka (Hakim, 2020). Dalam konteks komunitas lokal, akses ini mencakup informasi terkait pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan kebijakan publik.

Di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, akses informasi publik memiliki relevansi yang tinggi mengingat wilayah ini merupakan kawasan pesisir yang menghadapi tantangan besar terkait perubahan iklim dan ketahanan pangan (Lovanda Sari, 2022). Perempuan di wilayah ini, yang sering kali menjadi penopang ekonomi keluarga, sangat membutuhkan informasi untuk meningkatkan adaptasi terhadap tantangan lokal, seperti kenaikan permukaan laut dan risiko bencana alam.

Kendati demikian, hambatan seperti rendahnya tingkat literasi digital dan keterbatasan infrastruktur informasi masih menjadi masalah utama. Literasi digital, yang mencakup kemampuan mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi informasi, menjadi prasyarat penting untuk mengakses informasi publik secara efektif (Hartati, 2020). Kurangnya pelatihan dan dukungan infrastruktur sering kali memperburuk kesenjangan akses informasi antara perempuan dan kelompok masyarakat lainnya.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana akses informasi publik dapat memberdayakan perempuan di komunitas lokal? dan (2) Apa hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam mengakses informasi tersebut? Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang peran informasi publik dalam mendukung pemberdayaan perempuan, serta merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara efektif untuk meningkatkan akses informasi publik yang responsif gender, sehingga perempuan di komunitas lokal dapat lebih berdaya dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Studi ini juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan publik yang inklusif dan berbasis bukti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi partisipatif di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Responden utama adalah perempuan yang terlibat dalam program adaptasi perubahan iklim, urban farming, dan kesiapsiagaan bencana.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan kriteria: (1) perempuan kepala keluarga atau anggota aktif dalam komunitas lokal, (2) memiliki

pengalaman langsung dalam program pemberdayaan, dan (3) bersedia mengikuti wawancara. Data dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Informasi Publik dalam Pemberdayaan Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses terhadap informasi publik lebih mampu memanfaatkan program-program seperti urban farming untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga mereka. Informasi publik memberikan peluang bagi perempuan untuk memahami teknologi pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas hasil tani, serta mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor. Hal ini sejalan dengan temuan dari Lovanda Sari (2022) yang mengidentifikasi pentingnya informasi dalam adaptasi perubahan iklim di komunitas pesisir.

Selain itu, informasi publik terkait pendidikan dan kesehatan membantu perempuan memahami hak-hak mereka dalam pelayanan dasar. Misalnya, kampanye kesadaran akan pentingnya gizi keluarga melalui media lokal telah meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam program kesehatan komunitas (Hartati, 2020). Informasi semacam ini juga berperan dalam mengurangi risiko stunting pada anak di komunitas yang rentan.

Lebih jauh, akses terhadap informasi tentang manajemen risiko bencana memberikan perempuan kemampuan untuk melindungi diri dan keluarganya dari ancaman bencana alam. Sebagai contoh, program simulasi kesiapsiagaan bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo berhasil meningkatkan pemahaman perempuan tentang evakuasi darurat, distribusi sumber daya, dan peran dalam tim tanggap bencana (Laporan Kegiatan Akhir GCF, 2022).

Informasi tentang manajemen risiko bencana juga memberikan perempuan kemampuan untuk melindungi diri dan keluarganya. Sebagai contoh, program simulasi kesiapsiagaan bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo berhasil meningkatkan pemahaman perempuan tentang evakuasi darurat (Laporan Kegiatan Akhir GCF, 2022).

Hambatan dalam Mengakses Informasi Publik

Hambatan utama yang dihadapi perempuan meliputi:

1. Minimnya literasi digital menjadi tantangan signifikan yang menghambat perempuan untuk mengakses informasi publik secara efektif. Banyak perempuan di wilayah pesisir Kecamatan Koto Tangah tidak memiliki kemampuan memadai dalam menggunakan teknologi informasi, seperti internet atau perangkat digital. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan digital yang diterima oleh perempuan di wilayah tersebut (Hartati, 2020). Rendahnya literasi digital berdampak pada terbatasnya akses terhadap program-program pemberdayaan berbasis teknologi yang sering kali ditawarkan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah.
2. Selain literasi digital, keterbatasan infrastruktur informasi juga menjadi hambatan utama. Wilayah pesisir sering kali menghadapi masalah minimnya konektivitas internet dan kurangnya fasilitas pendukung, seperti pusat informasi komunitas. Kondisi ini mempersulit perempuan untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan publik, peluang ekonomi, atau pendidikan (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022). Kekurangan infrastruktur ini diperparah dengan alokasi sumber daya yang

tidak merata, di mana wilayah terpencil cenderung terabaikan dalam pengembangan teknologi informasi.

3. Kurangnya kebijakan yang responsif gender juga menghambat akses perempuan terhadap informasi publik. Peraturan dan program yang ada sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, seperti jadwal pelatihan yang tidak fleksibel atau kurangnya fasilitas pendukung seperti layanan penitipan anak selama pelatihan. Kebijakan yang tidak inklusif ini menciptakan hambatan tambahan, memperburuk marginalisasi perempuan dalam masyarakat lokal (Susanti, 2021). Kesenjangan akses ini memperburuk marginalisasi perempuan, terutama dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas (Susilo, 2021).

Strategi Penguatan Akses Informasi

Strategi akses informasi merupakan langkah penting dalam memastikan pemberdayaan perempuan di komunitas lokal. Teori partisipasi publik menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat, terutama perempuan, dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan keberlanjutan kebijakan yang diterapkan (Susanti, 2021). Oleh karena itu, akses informasi publik yang inklusif dan responsif gender harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pemberdayaan.

Dalam konteks literasi digital, perempuan di wilayah pesisir sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pendidikan teknologi. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat, tetapi juga pemahaman mendalam tentang cara mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif (Hakim, 2020). Pelatihan berkelanjutan yang menargetkan perempuan, seperti pelatihan manajemen data dan aplikasi teknologi, dapat membantu meningkatkan keterampilan ini.

Selain itu, penyediaan pusat informasi berbasis komunitas yang ramah gender dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan akses informasi. Pusat ini berfungsi sebagai tempat perempuan mendapatkan informasi terkini tentang peluang ekonomi, kebijakan lokal, dan layanan pendidikan. Pendekatan ini didukung oleh teori layanan informasi yang menekankan pentingnya interaksi langsung antara sumber informasi dan pengguna untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022).

Pelibatan aktif perempuan dalam penyusunan kebijakan lokal sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif gender tetapi juga berbasis bukti, mendukung kesetaraan akses informasi, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor (Hartati, 2020).

1. Pentingnya Literasi Digital untuk Pemberdayaan Perempuan

Strategi penguatan akses informasi tidak dapat dipisahkan dari peningkatan literasi digital, yang menjadi prasyarat penting dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Penelitian oleh Hartati (2020) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital di kalangan perempuan, terutama di daerah pedesaan dan pesisir, menjadi hambatan utama dalam mengakses informasi publik. Literasi digital mencakup kemampuan perempuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui teknologi digital. Program

pelatihan literasi digital yang menargetkan perempuan dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kesenjangan informasi antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, pelatihan tentang penggunaan internet, aplikasi komunikasi, serta analisis data dapat membantu perempuan untuk lebih memahami dan menggunakan teknologi sebagai alat pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengembangan Infrastruktur Informasi yang Aksesibel

Selain literasi digital, penguatan infrastruktur informasi juga menjadi aspek krusial dalam memastikan akses informasi yang setara bagi perempuan. Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika (2022), wilayah pesisir dan terpencil sering kali menghadapi kendala infrastruktur, seperti keterbatasan akses internet dan fasilitas informasi yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung akses informasi bagi perempuan. Pembangunan pusat informasi berbasis komunitas yang ramah gender, yang dapat menyediakan layanan informasi terkait kebijakan publik, peluang pendidikan, dan kesehatan, menjadi salah satu solusi strategis. Pusat ini dapat berfungsi sebagai tempat di mana perempuan dapat mengakses informasi secara langsung, tanpa terbatas oleh masalah konektivitas atau keterbatasan sumber daya teknologi.

3. Penyediaan Platform yang Responsif Gender

Strategi penguatan akses informasi harus memperhatikan responsivitas gender dari platform informasi yang disediakan. Penelitian oleh Sari (2020) menyebutkan bahwa banyak platform informasi, baik digital maupun non-digital, yang kurang ramah terhadap perempuan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Sebagai contoh, jadwal pelatihan yang tidak fleksibel, tidak ada fasilitas penitipan anak, atau kurangnya materi yang relevan dengan kebutuhan perempuan sering kali menjadi hambatan dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, platform informasi harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, seperti menyediakan jadwal yang fleksibel, fasilitas pendukung seperti layanan penitipan anak, dan informasi yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Pendekatan ini sesuai dengan teori akses informasi yang menyarankan bahwa informasi harus tersedia dengan cara yang mudah diakses oleh kelompok yang paling membutuhkan, terutama perempuan.

4. Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Penyebaran Informasi

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan institusi pendidikan sangat penting dalam memperkuat akses informasi untuk perempuan. Dalam studi oleh Indra (2019), ditemukan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dapat menghasilkan program pemberdayaan yang lebih efektif. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung akses informasi, sementara LSM dan institusi pendidikan dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan terkait penggunaan teknologi dan pemanfaatan informasi publik. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan jaringan yang lebih luas bagi perempuan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan publik, peluang ekonomi, serta masalah sosial yang relevan. Melalui kerjasama ini, dapat diciptakan

ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan dengan akses informasi yang lebih luas dan merata.

5. Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi

Pemanfaatan media sosial sebagai alat penyebaran informasi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat akses informasi bagi perempuan. Media sosial dapat menjangkau perempuan di berbagai daerah, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil atau pesisir, untuk memperoleh informasi terkait kebijakan publik, hak-hak sosial, dan program-program pemberdayaan. Penelitian oleh Siti (2021) mengungkapkan bahwa media sosial dapat menjadi saluran yang efektif untuk menjangkau audiens perempuan, terutama jika platform tersebut menyajikan informasi dalam format yang mudah diakses, seperti video tutorial atau infografis. Sebagai contoh, kampanye mengenai hak-hak perempuan atau program pemberdayaan ekonomi dapat disebarluaskan melalui platform seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Hal ini memungkinkan perempuan di berbagai daerah untuk terhubung dengan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus bergantung pada media konvensional yang mungkin lebih sulit dijangkau.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa akses informasi publik memainkan peran kunci dalam memberdayakan perempuan di komunitas lokal. Dengan informasi yang memadai, perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam program adaptasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan literasi digital dan kurangnya kebijakan yang responsif gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan akses informasi yang setara bagi perempuan.

REFERENSI

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). *Laporan Akses Informasi di Wilayah Pesisir*. Pemerintah Kota Padang.
- Hakim, A. (2020). Literasi digital sebagai alat pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Komunikasi*, 12(4), 231-245.
- Lovanda Sari. (2022). Urban farming dan adaptasi perubahan iklim: Studi kasus di Koto Tangah. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 14(1), 45-60.
- Susanti, N. (2021). Kesenjangan gender dalam pembangunan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 112-125.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.